



**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA - OPD) TAHUN 2024**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Dinas PPKBPPPA dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) DPPKBPPPA Tahun 2024 . Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPKBPPPA tahun 2024 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2024, adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPKBPPPA Tahun 2024 adalah Antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi daalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPKBPPPA selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2024
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing masing program dan kegiatan PPKBPPPA tahun 2024
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan PPKBPPPA tahun 2024.
5. Sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi PPKBPPPA Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

Semoga Rencana Kerja (Renja) PPKBPPPA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh DPPKBPPPA Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 3 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



M DANANG HARISUSENO, SAg.MH

NIP. 197011212000031003

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Data Pencapaian Pembangunan	
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional -----

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah -----

3.3. Program dan Kegiatan dan Subkegiatan -----

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH -----

BAB V PENUTUP-----

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Penjabaran visi

dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai misi dan indicator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat berdasarkan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman

kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat disusun berdasarkan RPD Kabupaten Lampung Barat, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lampung Barat bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka menyusun rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN.

1.3.2 Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini adalah:

- 1 Menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat;
- 2 Menetapkan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian Tujuan dan sasaran;
- 3 Menetapkan Program sebagai Rencana Aksi (*Action Plan*) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan,;
- 4 Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5 Menetapkan metode pelaksanaan serta sistem pemantauan dan evaluasi agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
- 6 Untuk memberikan pedoman bagi aparatur dan unit

kerja di lingkungan Dinas Pengendalin Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan pelayanan administrasi sebagai fungsi utamanya,

7. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab II merupakan Bab yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2021

BAB III : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : **Penutup**

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PPKBPPA
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat hubungannya dengan proses evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi dapat mengidentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi itu sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, tujuan yang akan di capai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Menurunnya Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak
3. Meningkatnya Kesetaraan Gender

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan empat sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kesertaan Ber KB bagi pasangan usia subur dengan indicator persentase peserta KB bagi pasangan usia subur
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) dengan indikator persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)
3. Terwujudnya Kabupaten layak Anak dengan indicator Strata/status Kabupaten layak Anak
4. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dengan indikator Indeks pemberdayaan gender (IDG)

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis mencapai sasaran strategis OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat menetapkan indicator kinerja utama,

Untuk mencapai indikator kinerja utama pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak Sepuluh (10) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan . Alokasi dana tahun 2022 setelah perubahan untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 11.538.488.110,- (Sebelas milyas lima ratus tiga puluh delapan empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah)** terealisasi sebesar **Rp 10.952.363.716 (Sepuluh milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah)**

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 1 sub kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja yang tidak mencapai 100% yaitu :

1. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kab/kota terelaisasi 70 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Lampung Barat
Tahun 2022

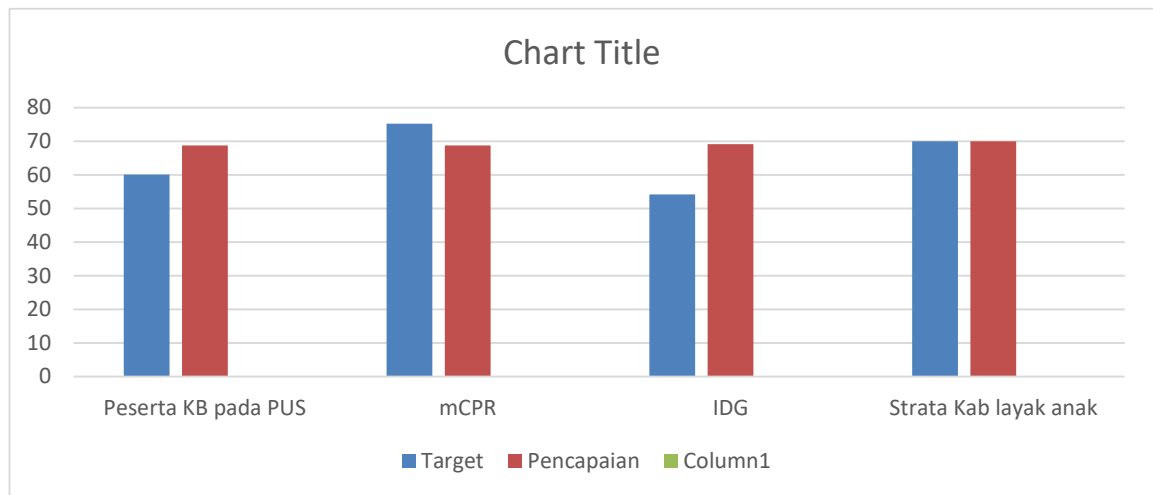
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	%	60.10	68.7	114.31
2	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	75.17	68.7	91.39
3	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya Kategori	madya	100.00
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	54.2	69.14	127.56

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur, dengan capaian kinerja 114.31 %, pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dengan capaian kinerja 127.56 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Strata/status Kabupaten Layak Anak, dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR), dengan capaian kinerja



1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 8 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dari sebanyak 8 sasaran strategis dengan sebanyak 8 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

2.2.2. Urusan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat untuk urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan sasaran strategis meningkatkan kesertaan ber KB bagi pasangan usia subur dan meningkatnya prevalensi pemakaian alat kontrasepsi modern (mCPR). Angka pemakaian kontrasepsi modern (CPR) adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dinyatakan dalam bentuk persentase, dengan rumusan

$$\frac{\sum \text{PUS aktif}}{\sum \text{PUS}} \times 100$$

Data jumlah PUS ada peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan Penduduk

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,93	0,93	0,93

Sumber data : Dinas PPKBPPPA, 2022

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah angka yang menunjukkan presentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Data Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun s.d Tahun 2022

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A. Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum	Kasus			4	24	11
1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum		-	-	2	7	3
(a) Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Orang	-	-	0	0	1
(b) Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Orang	-	-	2	7	3
2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	9	16	4	17	8
(a) Jumlah Anak Sebagai Pelaku	Orang	4	0	0	4	8
(b) Jumlah Anak Sebagai Korban	Orang	5	16	4	13	10
(c) Jumlah Anak Sebagai Saksi	Orang	-	-	0	0	0
B. Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		5	20	6	20	9
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan		-	-	2	7	3
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan	Kasus	-	-	2	1	3

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti						
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	-	-	0	0	0
2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan		5	20	4	13	6
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	5	20	4	13	6
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	-	-	0	0	0
C. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	Unit	1	1	1	3	3
1. Jumlah Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)/ P2TP2A	Unit	1	1	1	1	1
2. LPAI (Lembaga perlindungan anak Indonesia)		-	-	-	1	1
3. KPAI (Komisi Perlindungan anak Indonesia)		-	-	-	1	1

Sumber Data: Dinas KBPP&PPPA Tahun 2023

Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 sebagian besar (83%) adalah kasus persetubuhan pada anak dibawah umur, 17% ada kasus orang hilang. Kasus persetubuhan terjadi pada 9 anak yang tersebar di Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau, Pekon Sumber Agung kecamatan suoh, pekon padang dalam kecamatan Balik Bukit, Pekon simpang sari kecamatan sumber jaya, kelurahan pasar liwa.

Sedangkan kasus perempuan yang mengalami kekerasan terjadi 66,6 % kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 13,6% adalah kasus penganiayaan. Kasus KDRT terjadi di Kelurahan way mengaku Kecamatan Balik Bukit , kasus penganiayaan terjadi di pekon Sukajaya Kecamatan Sumber Jaya.

Anak- anak yang berhadapan dengan hukum 100% adalah pelajar yang berasal dari Pekon Buay Nyerupa Kec.Sukau, Pekon Sukamaju 2 kelurahan Pajar Bulan Kec.Way Tenong dan Pekon Padang Dalam Kec.Balik Bukit. Jenis kasus yang dilakukan adalah Kekerasan Anak dibawah umur Yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain , dan kasus pencurian.

Tabel 2.1.

Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Eksekutif dan Legislatif
Tahun 2020 – 2022

Tahun	Jumlah Perempuan sebagai anggota DPRD		Jumlah Perempuan sebagai Aparat Negeri Sipil (ASN)	
	Jumlah (org)	%	Jumlah (org)	%
2020	5	14,28	1.992	52,35
2021	6	17,14	2.017	53,32
2022	6	17,14	2.058	53,46

Sumber: Data Dinas PPKBPPA, Tahun 2023

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi

terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung.

Partisipasi perempuan diparlemen saat ini di kabupaten Lampung Barat 17,14% sedangkan pada Lembaga eksekutif 53,46%.

Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang public.

Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik

Tabel 2.2.
Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2020 – 2022

Uraian	2020	2021	2022
IPG (%)	92,95	93,00	93,4
IDG (%)	68,24	69,14	65.94

IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living) Di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 IPG 93 Point, capaian ini mengalami kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya,

Tabel 2.3.
Data Keluarga Berencana

Keluarga Berencana	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
1. Jumlah Pasangan Usia Subur		87.111	93.824	47.596
1. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB	Pasang	64.810	69.078	32.705
2. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode				
1. Suntik KB	Orang	24852	26.048	20.497
2. Obat/Pil KB	Orang	13735	15.211	4.197
3. IUD/Spiral	Orang	8527	8.719	383
4. Susuk/implant	Orang	15731	16.764	6.940
5. Kondom	Orang	1194	1.528	252
6. Vagina Diafragma	Orang	0	0	0
7. Spermatisida	Orang	0	0	0
8. Vasektomi/MOP	Orang	137	137	19
9. Tubektomi /MOW	Orang	634	671	221

Keluarga Berencana	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
3. Sarana Dan Prasarana KB				
1. Jumlah Alat Peraga KB / genre kit	Kit	2	0	
2. Jumlah Balai KB	Balai Penyuluh KB	15	15	15
3. Unit Pelayanan KB		60	91	
4. Jumlah Tenaga Klinik KB**	Orang			
5. Jumlah Petugas KB**	Orang	19	17	
6. Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan**	Institusi	136	136	136
7. Jumlah Kelompok Bina Keluarga**	Kelompok			
BKB	Kelompok	74	85	
BKR	Kelompok	42	40	
BKL	Kelompok	69	33	

Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2023

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Pendataan Keluarga di Kabupaten Lampung Barat. Untuk data PUS yang digunakan pada Tahun 2022 menggunakan Data Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021. Di atas terlihat perbedaan jumlah Pus, tetapi data tersebut adalah data real berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021.

Capaian KB tahun 2020 dan tahun 2021 dari target yang sudah diberikan terealisasi lebih dari 100%. Untuk capaian KB tahun 2022 terealisasi lebih dari 100% khusus untuk KB MKJP.

Tabel 2.4.

Pencapaian Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022
1	Laju pertumbuhan penduduk	0.93
2	Angka kelahiran total (TFR)	2,48
3	Persentase peserta KB Aktif	68,7
4	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	68,7
5	Angka usia kawin pertama	19,8
6	Persentase Pengetahuan PUS tentang/Cara Kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	
7	Persentase Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB -Posyandu-PAUD)	
8	Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23,17
9	Persentase Remaja yang dibina tentang Kesehatan Reproduksi	
10	Jumlah Pusat Informasi Konseling - Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-RR) yang aktif	

Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2023

Angka kelahiran Total (TFR) Kabupaten Lampung Barat masih diatas TFR Provinsi Lampung. TFR Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 2,3%, artinya Kabupaten Lampung Barat masih harus menurunkan 0,18%. Untuk peserta KB Aktif pada Tahun 2022 memang tidak tercapai 100% karena ditahun ini lebih focus untuk pelayanan KB dengan metode MKJP. Media Usia Kawin Pertama dikabupaten Lampung Barat 19,8%, artinya kita harus masih menurunkan lagi angka tersebut.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian dan Provinsi dan implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- **Isu Strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan**

- a. Bonus Demografi**

Pembangunan di Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing , yaitu SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan pembangunan diarahkan diantaranya melalui peningkatan produktifitas Angkatan kerja , peningkatn kualitas anak , perempuan dan pemuda. Salah satu factor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total (TFR).

Struktur penduduk dengan dengan proporsi usia produktif lebih tinggi merupakan peluang kita mendapatkan bonus demografi. Maka untuk tetap menjaga struktur tersebut harus menjaga TFR pada level tertentu Bonus demografi merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sector pembangunan

- b. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga**

Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup , akan lebih komprehensif apabila dimulai dari tahapan perencanaan kehidupan berkeluarga, merencanakan jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan merupakan fase penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1000 Hari Pertama Kehidupan, Pendidikan anak usia dini , usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas

- c. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern**

Adanya penurunan 4% pengguna kontrasepsi modern dari hasil SDKI tahun 2012 dan 2017, khususnya dikalangan usia produktif /pasangan usia muda disebabkan karena rendahnya pengetahuan pasangan usia muda terhadap Kesehatan reproduksi , dan rendahnya informasi tentang KB.

- d. Rendahnya pemahaman remaja tentang Kesehatan reproduksi**

Kendala yang ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait Kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga . Indikator ini ditunjukkan pada angka kelahiran umur 15-19 tahun (ASFR) yang masih relative tinggi

e. Kebutuhan ber KB pada PUS yang belum terlayani (Un Meet Need)

Hasil SUPAS 2015 menunjukkan 18,3% dan menunjukkan penurunan pada tahun 2016 menjadi 15,8% , meningkat Kembali menjadi 17,5% pada tahun 2017. Dan di Propinsi Lampung pada tahun 2021 hasil Pendatan Keluarga diperoleh angka 15,6% dan Lampung Barat 16,4% .

Beberapa alasan Wanita tidak mau ber Kb adalah karena takut efek samping KB, Sebagian lagi karena memang tidak ingin ber KB

• Isu terkait Pengarusutamaan Gender

a. Masih adanya ketimpangan Gender , yang ditunjukkan dengan indicator IPG 93 point

Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dimana pembangunan perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Pembangunan laki- laki sudah berstatus “tinggi” dengan IPM di atas 70 sedangkan pembangunan perempuan masih dikisaran angka 60-an dan berstatus “sedang”. Hal inilah yang menyebabkan IPG Kabupaten Lampung Barat masih berada di bawah 100 dalam kurun waktu 2010-2020. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung berdasarkan tiga komponen yaitu persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi, serta persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Capain IDG Provinsi Lampung termasuk dalam kategori rendah, masih jauh dibandingkan dengan capaian Nasional. Hal ini dikarenakan masih rendahnya capaian dari ke tiga komponen penyusun IDG (keterlibatan perempuan di parlemen yaitu 20%, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi sebesar 50,75% dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja 29,38%). IDG Kabupaten Lampung Barat 68,24.

• Isu tentang perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Kasus- kasus kekerasan lebih banyak dijumpai di kalangan perempuan dan anak, namun banyak kasus yang tidak dilaporkan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil telaahan kebutuhan-kebutuhan pada saat proses penyusunan RKPD dilaksanakan. Telaahan kebutuhan dimaksud berupa indikator kinerja yang diharapkan, program dan kegiatan yang akan diusulkan serta kebutuhan pagu dana indikatif yang diperlukan

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas PPKBPPA

Rancangan Awal Renja				Hasil Analisis Kebutuhan						
Urusan/ Bidang Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target	Pagu Indikator	Urusan/ Bidang Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target	Pagu Indikator	catatan Penting
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.398.618.509,0	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.398.618.509,0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6,141,754,200.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6,141,754,200.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA (%)	80	3.890.796.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA (%)	80	3.890.796.000,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	27	38.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	27	38.000.000,00	

		disusun (Dokumen)					disusun (Dokumen)			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10.00	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10.00	5.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	4.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.00	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1.00	4.000.000,00	

		Kinerja SKPD (Laporan)					Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12.00	9.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12.00	9.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan PD yang dilaksanakan (%)	100	2.696.141.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan PD yang dilaksanakan (%)	100	2.696.141.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29.00	2.631.801.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29.00	2.631.801.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(BALIK BUKIT, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	25.605.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(BALIK BUKIT, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	25.605.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	17.825.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	17.825.000,00	

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.00	20.910.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.00	20.910.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan (%)	100	10.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan (%)	100	10.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	10.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	10.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan (%)	100	234.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan (%)	100	234.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	9.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	9.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	27.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	27.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	8.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	8.500.000,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	8.000.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	8.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42	175.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42	175.000.000,00
	(Jakarta, luar daerah provinsi lampung, dan dalam daerah provinsi lampung, Luar Wilayah)		22	150.000.000,00		(Jakarta, luar daerah provinsi lampung, dan dalam daerah provinsi lampung, Luar Wilayah)		22	150.000.000,00
	(Balik bukit, Balik Bukit)		23	25.000.000,00		(Balik bukit, Balik Bukit)		23	25.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(balik bukit, Balik Bukit)	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan (%)	100	410.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(balik bukit, Balik Bukit)	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan (%)	100	410.000.000,00
Pengadaan Mebel	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	50.000.000,00	Pengadaan Mebel	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	50.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	50.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	295.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	295.000.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(balik bukit, Balik Bukit)	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	181.655.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(balik bukit, Balik Bukit)	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	181.655.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	6.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	30.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	27.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	27.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	118.655.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	118.655.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	321.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	321.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	265.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	265.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	11.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	11.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	45.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	45.000.000,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Meningkatnya anggaran responsif gender pada APBD (%)	3.5	646,239,500.00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Meningkatnya anggaran responsif gender pada APBD (%)	3.5	646,239,500.00
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi kebijakan PUG dan PPRG (Perangkat Daerah)	55	323.159.000,00	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi kebijakan PUG dan PPRG (Perangkat Daerah)	55	323.159.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Kec. Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	43	65.128.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Kec. Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	43	65.128.000,00

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	43.00	258.031.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	43.00	258.031.000,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	55	323.080.500,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	55	323.080.500,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	55.00	286.193.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	55.00	286.193.000,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	36.887.500,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	36.887.500,00

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan teakhir (%)	1.5	316,991,000.00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan teakhir (%)	1.5	316,991,000.00
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah peserta yang diedukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan (Orang)	120	167.549.500,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah peserta yang diedukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan (Orang)	120	167.549.500,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	(liwa, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	80.865.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	(liwa, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	80.865.000,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	43	86.684.500,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	43	86.684.500,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab kota (Layanan)	6	76.360.500,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab kota (Layanan)	6	76.360.500,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(Layanan)	16	76.360.500,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(Layanan)	16	76.360.500,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga Penyedia Layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten /kota yang mendapat peningkatan kapasitas (Orang)			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga Penyedia Layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten /kota yang mendapat peningkatan kapasitas (Orang)		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	50	73.081.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	50	73.081.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	0.00	73.081.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	0.00	73.081.000,00

		Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)					Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		% keluarga berkualitas (%)	30	456,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		% keluarga berkualitas (%)	30	456,000,000.00	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (OPD)	43	200.000.000,00	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (OPD)	43	200.000.000,00	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)		-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)		-	

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1.00	200.000.000,00	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1.00	200.000.000,00	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Pekon terbaik pelaksana P3KSS dan GSI (Desa)	1	256.000.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Pekon terbaik pelaksana P3KSS dan GSI (Desa)	1	256.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	256.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	256.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		% data gender dan anak yang terupdate (%)	70	60,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		% data gender dan anak yang terupdate (%)	70	60,000,000.00	

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Profil Data terpilah Gender yang tersusun (Buku)	55	60.000.000,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Profil Data terpilah Gender yang tersusun (Buku)	55	60.000.000,00
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Kec. Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	50	60.000.000,00	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	(Way Mengaku, Kec. Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	50	60.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Terpenuhinya Hak-hak anak (Kategori)	Madya	147,556,000.00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Terpenuhinya Hak-hak anak (Kategori)	Madya	147,556,000.00
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, mediantan dunia usaha (Organisasi)	25	147.556.000,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, mediantan dunia usaha (Organisasi)	25	147.556.000,00

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)	5	147.556.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	(balik bukit, Balik Bukit)	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)	5	147.556.000,00
	(5 kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		125	73.778.000,00		(5 kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		125	73.778.000,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	jumlah lembaga penyedia yang mengikuti bimktek (Lembaga)	3	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	jumlah lembaga penyedia yang mengikuti bimktek (Lembaga)	3	-
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Balik Bukit	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	95.750.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Balik Bukit	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	95.750.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekincau, Sukau	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	65.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekincau, Sukau	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	2	65.000.000

							Kabupaten/Kota (Dokumen)			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	89.476.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	89.476.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensi (%)	62	742,826,700.00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensi (%)	62	742,826,700.00	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				356.447.000,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				356.447.000,00	
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	(balik bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)	2	200.000.000,00	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	(balik bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)	2	200.000.000,00	

	(Balik bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		75	100.000.000,00		(Balik bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		75	100.000.000,00	
	(balik bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		60	100.000.000,00		(balik bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		60	100.000.000,00	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)	30.00	45.947.000,00	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)	30.00	45.947.000,00	
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota(Dokuman)	1	110.500.000,00	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota(Dokuman)	1	110.500.000,00	
	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		100	110.500.000,00		(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		100	110.500.000,00	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				307.069.300,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				307.069.300,00	

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)	22	307.069.300,00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)	22	307.069.300,00	
			20					20		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				79.310.400,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				79.310.400,00	
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK(Orang)	180.00	79.310.400,00	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK(Orang)	180.00	79.310.400,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,873,209,309.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,873,209,309.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0.00	

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		% OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan (%)	27	1,557,500,000.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		% OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan (%)	27	1,557,500,000.00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah dokumen GDPK disusun (Dokumen)	1	1.105.000.000,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah dokumen GDPK disusun (Dokumen)	1	1.105.000.000,00
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	275.000.000,00	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	275.000.000,00
	(Balik Bukit, Balik Bukit)		30	75.000.000,00		(Balik Bukit, Balik Bukit)		30	75.000.000,00
	(Balik Bukit, Balik Bukit)		30	200.000.000,00		(Balik Bukit, Balik Bukit)		30	200.000.000,00
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	7	210.000.000,00	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	7	210.000.000,00
	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		2	20.000.000,00		(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		2	20.000.000,00
	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		7	190.000.000,00		(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		7	190.000.000,00

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	50	160.000.000,00	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	50	160.000.000,00	
	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		50	80.000.000,00		(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		50	80.000.000,00	
	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		50	80.000.000,00		(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		50	80.000.000,00	
Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal (Kegiatan)	1	165.000.000,00	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal (Kegiatan)	1	165.000.000,00	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal (Kegiatan)	2	60.000.000,00	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal (Kegiatan)	2	60.000.000,00	
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	(Seluruh Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	1	165.000.000,00	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	(Seluruh Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	1	165.000.000,00	

							Keluarga Berencana) (Dokumen)			
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	70.000.000,00	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	70.000.000,00	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Dokumen)	1	452.500.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Dokumen)	1	452.500.000,00	
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	5	12.000.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	5	12.000.000,00	
	(Way Mengaku, Balik Bukit)		1.000	12.000.000,00		(Way Mengaku, Balik Bukit)		1.000	12.000.000,00	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	(15 Faskes, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	148.500.000,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	(15 Faskes, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	148.500.000,00	
	(15 Faskes, KAB. LAMPUNG BARAT)		15			(15 Faskes, KAB. LAMPUNG BARAT)		15		
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	(15 kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	132.000.000,00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	(15 kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	132.000.000,00	

			180	132.000.000,00				180	132.000.000,00	
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	59	80.000.000,00	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	59	80.000.000,00	
	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		15	30.000.000,00		(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		15	30.000.000,00	
	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		59	50.000.000,00		(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		59	50.000.000,00	
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	50	80.000.000,00	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	50	80.000.000,00	
			50					50		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP (%)	27	3,746,785,000.00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP (%)	27	3,746,785,000.00	
		% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need (%)	16				% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need (%)	16		
		% Pekon yang menjadi kampung KB (%)	72.79				% Pekon yang menjadi kampung KB (%)	72.79		

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kecamatan (Kali)	4	1.090.785.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kecamatan (Kali)	4	1.090.785.000,00
Pengendalian Program KKBPK	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1.00	49.500.000,00	Pengendalian Program KKBPK	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1.00	49.500.000,00
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	15	660.000.000,00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	15	660.000.000,00
			43					43	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	4	264.000.000,00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	4	264.000.000,00

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	4	88.000.000,00	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	4	88.000.000,00
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	4	24.910.000,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	4	24.910.000,00
	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		320	12.160.000,00		(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		320	12.160.000,00
	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		85	12.750.000,00		(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		85	12.750.000,00
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	8	4.375.000,00	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	8	4.375.000,00

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	(Kecamatan se-kab Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Persentase peserta KB Baru (%)	80	652.800.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	(Kecamatan se-kab Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Persentase peserta KB Baru (%)	80	652.800.000,00
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	136	652.800.000,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	136	652.800.000,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	(Kecamatan se Kab Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Pelaksanaan pelayanan KB di Faskes dan jejaringnya (Bulan)	12	684.200.000,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	(Kecamatan se Kab Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Pelaksanaan pelayanan KB di Faskes dan jejaringnya (Bulan)	12	684.200.000,00
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1.00	13.200.000,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1.00	13.200.000,00
	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		15			(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		15	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1000	275.000.000,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1000	275.000.000,00

Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	(15 kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	1	220.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	(15 kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	1	220.000.000,00	
			15					15		
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	110.000.000,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	110.000.000,00	
	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		15	110.000.000,00		(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		15	110.000.000,00	
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	(Kelurahan Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	50	66.000.000,00	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	(Kelurahan Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	50	66.000.000,00	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah kampung KB berkembang dan Mandiri (Desa)	5	1.319.000.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah kampung KB berkembang dan Mandiri (Desa)	5	1.319.000.000,00	

Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	7.00	210.000.000,00	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	7.00	210.000.000,00	
			15					15		
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB(Dokumen)	1	9.000.000,00	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB(Dokumen)	1	9.000.000,00	
			30					30		
Pembinaan Terpadu Kampung KB	(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB(Laporan)	1.00	220.000.000,00	Pembinaan Terpadu Kampung KB	(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB(Laporan)	1.00	220.000.000,00	
	(136 Desa/Kelurahan, KAB. LAMPUNG BARAT)		136	220.000.000,00		(136 Desa/Kelurahan, KAB. LAMPUNG BARAT)		136	220.000.000,00	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	(15 Kecamatan Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	59	880.000.000,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	(15 Kecamatan Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	59	880.000.000,00	

	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		30	880.000.000,00		(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		30	880.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Indeks pembangunan Keluarga (%)	54	2,568,924,309.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Indeks pembangunan Keluarga (%)	54	2,568,924,309.00	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Persentase kelompok kegiatan yang dibina (%)	52	2.568.924.309,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Persentase kelompok kegiatan yang dibina (%)	52	2.568.924.309,00	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	1	155.270.918,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	1	155.270.918,00	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	93.500.000,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	93.500.000,00	
			30					30		

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(15 Kecaamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	15	85.800.000,00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(15 Kecaamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	15	85.800.000,00
			15					15	
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	72	99.000.000,00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	72	99.000.000,00
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(15 Kecamatan Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1.00	110.000.000,00	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(15 Kecamatan Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1.00	110.000.000,00
			40					40	

Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	(Pembinaan Pencegahan Kasus Stunting di Pekon Locus Stunting, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	1	131.488.500,00	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	(Pembinaan Pencegahan Kasus Stunting di Pekon Locus Stunting, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	1	131.488.500,00
	(15 Pekon Locus Stunting, KAB. LAMPUNG BARAT)		40	131.488.500,00		(15 Pekon Locus Stunting, KAB. LAMPUNG BARAT)		40	131.488.500,00
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	645	1.567.500.000,00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	645	1.567.500.000,00
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(15 Kelompok PIK R, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	15	99.000.000,00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(15 Kelompok PIK R, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	15	99.000.000,00
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling	6	227.364.891,00	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi	6	227.364.891,00

Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)		Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan usulan kegiatan dilakukan berbagai tahapan-tahapan yaitu penjaringan usulan masyarakat dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pekon/Desa, Musrenbang Kecamatan yang kemudian dilakukan pembahasan dengan Tim terkait di tingkat Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti dengan Musrenbang Kabupaten.

Pembahasan dilakukan untuk menelaah apakah usulan-usulan tersebut sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan yang diterapkan, urgensi dan kemanfaatan kepada masyarakat, serta aspek-aspek perencanaan lain yang relevan. Pembahasan dilakukan juga agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi atas usulan dan pendanaan baik internal OPD maupun lintas OPD.

Berikut adalah penelaahan atas usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat
Nama Perangkat Daerah : Dinas PPKBPPPA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana				
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan dan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Di daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Kecamatan se-kab LB	Jumlah akseptor MKJP	3000 akseptor	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) dan sarana Penunjang pelayanan KB	Kecamatan se-kab LB			
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sumber Jaya, Sukau	Taman Bermain	2 unit	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra Kementerian/ Lembaga maupun Renstra Provinsi sedikitnya terdapat korelasi secara tidak langsung yang mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Lampung Barat

NO	Kebijakan Nasional/Propinsi	Sumber	Ket
1	Menurunnya angka kelahiran total Total Fertility Rate/TFR) menjadi 2,1 di tahun 2024. 2	Renstra BKKBN Pusat	
2	Meningkatnya Median Usia Kawin	Renstra BKKBN Pusat	
3	peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan	
4	peningkatan perlindungan anak	Perlindungan Anak Republik Indonesia	
5	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Nomor 2 TAHUN 2020 tentang Renstra Kementerian PPPA	

3.2 . TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lanjut dari Visi yang memuat pernyataan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan tidak selalu dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak “

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya kepesertaan ber-KB pada PUS
2. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Tabel. 3.2

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PPKBPPA**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja/Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4					
1	Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak		TFR	2,35	2,32	2,30	2,28	
			IPG	93,05	93,10	93,15	93	
			IPA	64,0	64,05	65	65,05	
		Meningkatnya kepesertaan ber-KB pada PUS	Persentase pengguna KB Modern (modern Contracepsi Prevalence)	69%	70%	71%	72%	
		Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender		69	69,5	70	70,5
				IPKA	63.76	64.1	64.7	65
IPHA	59.03			60	62.7	63		

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mengimplementasikan perencanaan yang sudah disusun, pada penjabarannya dilakukan berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan yang disusun tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Beberapa factor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan program dan kegiatan tahun 2023 ini adalah :

Untuk mendukung sasaran Kabupaten Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing , yang terbagi dalam 2 kelompok besar berdasarkan sasaran dinas yang diampunya yaitu :

1. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran dinas Meningkatnya kepesertaan KB Pada PUS

2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6,576,134,900
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			193,284,000
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			48,376,000
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,376,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			144,908,000
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	7,528,000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5,300,000
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132,080,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3,129,778,800
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			1,024,157,100
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,375,000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,910,000
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,372,100
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		234,000,000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	607,500,000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		40,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			652,800,000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	652,800,000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			512,486,700

2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,515,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	262,220,200
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191,094,000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		9,657,500
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	40,000,000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			940,335,000
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,791,000
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	759,000,000
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,544,000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3,253,072,100
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3,253,072,100
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,055,000
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,607,720,000
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,728,400
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	13,353,500
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,420,700,000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	33,515,200

2. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Kode Rekening				Program/Kegiatan/Sub	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah Dana	
2	08	02					482,909,000	
2	08	02	2.01				258,031,000	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	258,031,000
2	08	02	2.03				224,878,000	

2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Sumber Jaya, Sindang Pagar; Kab. Lampung Barat, Kebun Tebu, Tribudi Syukur	224,878,000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			105,893,000
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			61,440,000
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	61,440,000
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			44,453,000
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Belalau, Semua Kelurahan; Kab. Lampung Barat, Batu Brak, Semua Kelurahan	44,453,000
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			120,381,000
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			94,437,000
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,437,000
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			25,944,000
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	25,944,000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			43,690,000
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			43,690,000
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,690,000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			194,349,000
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			153,349,000
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	75,101,000
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,248,000
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			41,000,000
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Air Hitam, Gunung Terang	41,000,000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			537,777,800
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			111,568,000

2	08	07	2.01	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,568,000
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			363,099,800
2	08	07	2.02	0 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	363,099,800
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63,110,000
2	08	07	2.03	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	63,110,000

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program 10 program pendukung sasaran kabupaten dan 1 program penunjang urusan
2. Kegiatan : 26 kegiatan
3. Sub Kegiatan : 80 Sub kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kerja dan pendanaan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah cara untuk mencapai keberhasilan program. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya Rencana kerja dan pendanaan tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. Adapun Anggaran Rencana kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat yang direncanakan untuk periode tahun 2023 beserta prognosisnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas PPKBPPPA Lampung Barat TA 2024

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu sementara
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13,801,625,880
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	80.00%	3,991,451,000
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	19 dokumen	34,000,000
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	4,500,000
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	6,500,000
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	3,500,000

01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4,000,000
01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4,000,000
01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3,500,000
01.1.01 .07	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja	4 dokumen	8,000,000
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan PD yang dilaksanakan	100%	2,644,301,000
01.2.02 .01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	28 orang	2,631,801,000
01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	3,500,000
01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	5,000,000
01.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 lap	4,000,000
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan	100%	15,000,000
01.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 orang	15,000,000
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan	100%	199,500,000
01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	6,000,000
01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 jenis	8,000,000
01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	20,000,000
01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 SKHU	8,000,000

01.2.06 .08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu/makan minum tamu yang dipenuhi	12 bulan	7,500,000
01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	150,000,000
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	515,000,000
01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	14 unit	45,000,000
01.2.07 .06	Pengadaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya	4 Unit	50,000,000
01.2.07 .09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	1 unit	400,000,000
01.2.07 .11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	20,000,000
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	178,000,000
01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Surat Menyurat	12 laporan	5,000,000
01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	33,000,000
01.2.08 .03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 laporan	25,000,000
01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	115,000,000
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	405,650,000
01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya	30	350,000,000
01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	10,650,000
01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/rehabilitasi	1	45,000,000

	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
2.08	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		37,79	2,739,484,500
2.08.0 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya anggaran responsif gender pada APBD	10%	333,031,000
2.08.0 2.2.01	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER(PUG) pada LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi kebijakan PUG dan PPRG	55(OPD dan Kec)	333,031,000

2.08.02 .2.01.0 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	55 OPD	258,031,000
2.08.02 .2.01.0 4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	55 OPD	75,000,000
2.08.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	50%	603,906,500
2.08.0 3.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diedukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	120 orang	170,000,000
2.08.0 3.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten	1 dokumen	80,000,000
2.08.0 3.2.01. 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten	55 OPD	90,000,000
2.08.0 3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab kota	6 layanan	167,100,500
2.08.0 3.2.02. 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 orang	95,000,000
2.08.03 .2.02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah layanan tindak lanjut bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	6 layanan	72,100,500
2.08.0 3.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga Penyedia Layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab yang	60 orang	266,806,000
2.08.03 .2.03.0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan	1 laporan	76,806,000

		Kabupaten/Kota Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
2.08.0 3.2.03. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	70 orang	100,000,000
2.08.0 3.2.03. 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	90,000,000
2.08.0 4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	% kader perempuan yang dibina	20%	265,000,000
2.08.0 4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader P3KSS dan GSI yang dibina	150 orang	175,000,000
2.08.04 .2.01.0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten	55 Perangkat Daerah	85,000,000
2.08.04 .2.01.0 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	90,000,000
2.08.0 4.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pekon terbaik pelaksana P3KSS dan GSI	1 pekon	90,000,000
2.08.04 .2.02.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 lembaga	90,000,000
2.08.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% OPD yang memanfaatkan data pilah gender	30%	125,000,000

2.08.0 5.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Data terpilah Gender yang tersusun	50 buku	125,000,000
2.08.0 5.2.01. 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia	50 buku	65,000,000
2.08.0 5.2.01. 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55 buku	60,000,000
2.08.0 6	PROGRAM PEMENUHN HAK ANAK	Terpenuhinya Hak-hak anak	580	715,000,000
2.08.0 6.2.01.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Perangkat daerah yang diadvokasi	55 PD	100,000,000
2.08.06 .2.01.0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non PemerintahnMedia dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada OrganisasiPemerintah, Non Pemerintah, media dan dunia usaha	25 organisasi	100,000,000
2.08.06 .2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia yang mengikuti bimktek	3 lembaga	615,000,000
2.08.06 .2.02.0 1	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 orang	100,000,000
2.08.06 .2.02.0 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 set	65,000,000
2.08.06 .2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten?Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 dokumen	450,000,000

2.08.07	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	60%	697,547,000
2.08.07 .2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat daerah yang diadvokasi	55 PD	162,724,000
2.08.07 .2.01.0 1	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55 PD	112,724,000
2.08.07 .2.01.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50,000,000
2.08.07 .2.02	Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)	434,823,000
2.08.07 .2.02.0 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan	20 orang	91,000,000
2.08.07 .2.02.0 2	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab kota	20 orang	189,943,000
2.08.07 .2.02.0 2	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Singkronisasi Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 (Layanan konseling)	103,880,000
2.08,06 .2.02.0 3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	3	50,000,000
2.08.07 .2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan	12 orang	100,000,000

	Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.07 .2.03.0 1	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	Jumlag laporan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	1 laporan	100,000,000
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7,070,690,380
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	% masyarakat yang terpapar bangga kencana	70%	645,000,000
2.14.02 .2.01	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dg pemda kab/kot dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah dokumen GDPK disusun	1 dokumen	350,000,000
2.14.02 .2.01 .01	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)	1 dok	150,000,000
2.14.02 .2.02	Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota	jumlah dokumen Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota	20 dok	250,000,000
2.14.02 .2.10	Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	dokumen hasil pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	2 dok	50,000,000
2.14.02 .2.01. 15	pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK	jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana (KKBPK)	1 laporan	50,000,000
2.14.02 .2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga	50 dok	295,000,000
2.14.02 .2.02.0 3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga	50 dok	75,000,000
2.14.02 .2.02.0 8	Pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat intergrasi program KKBPK di sektor lain	Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat intergrasi program KKBPK di sektor lain	59 unit	75,000,000
2.14.02 .2.02.1 1	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	5 dokumen	10,000,000

2.14.02 .2.02.1 2	pencatatan dan pengumpulan data keluarga	jumlah data dan dan informasi keluarga pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 laporan	135,000,000
2.14.02 .2.02.1 3	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 dokumen	132,000,000
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Peserta KB Aktif (PA) MKJP	25%	4,187,000,000
		% PUS yang tidak terlayani/ Unmeet need	16%	
2.14.03 2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi dan Informasi edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kecamatan	4 kali	190,000,000
2.14.03 2.01.01	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga ,kependudukan , dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	8 org	60,000,000
2.14.03 2.01.02	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen KIE Program Bangga Kencana	4 dok	50,000,000
2.14.03 2.01.04	Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	4 dok	80,000,000
2.14.03 2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 laporan	240,000,000
2.14.03 2.01.07	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Jumlah Laporan hasil pengelolaan operasioanl dan srana di balai penyuluhan bangga kencana (pembangunan keluarga , kependudukan dan KB	15 laporan	600,000,000
2.14.03 2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	1 laporan	45,000,000
2.14.03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas KB	Persentaser peserta KB Baru	80%	210,000,000

2.14.03 2.02.01	Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB	15 organisasi	50,000,000
2.14.03 2.02.02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB PLKB yang tersedia	15 Unit	100,000,000
2.14.03 2.02.04	Penggerakan kader IMP	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader IMP	136 orang	60,000,000
2.14.03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pelayanan KB di Faskes dan jejaringnya	12 bulan	2,387,000,000
2.14.03 2.03.01	pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	1 laporan	12,000,000
2.14.03 2.03.02	peningkatam kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kb	Jumlah akseptor Peningkatan Komptensi Pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB	45 orang	75,000,000
2.14.03 2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	1000 orang	250,000,000
2.14.03 2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang pelayanan KB	1 dokumen	200,000,000
2.14.03 2.03.06	penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit sarana penunjang pelayanan KB	15 unit	1,600,000,000
2.14.03 2.03.08	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	100,000,000
2.14.03 2.03.09	Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	15 orang	90,000,000
2.14.03 2.03.10	Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	50 orang	60,000,000
2.14.03 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi dan Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kampung KB berkembang dan Mandiri	5 pekon berkembang, 1 mandiri	1,400,000,000

	dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB			
2.14.03 2.04.01	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	7 organisasi	250,000,000
2.14.03 2.04.02	Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi Pembangunan lintas sektor di kampung KB	15 dokumen	150,000,000
2.14.03 2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	59 pekon	800,000,000
2.14.03 2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB	1 laporan	200,000,000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	indeks pembangunan keluarga	52,52	2,238,690,380
2.14.04 .2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang dibina	52%	2,238,690,380
2.14.04 .2.01.0 1	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 kelompok	200,000,000
2.14.04 .2.01.0 2	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah Unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	15 unit	78,000,000
2.14.04 .2.01.0 3	Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah laporan hasil Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	1 laporan	100,000,000

2.14.04 .2.01.0 4	Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah kader Pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS)	72 orang	90,000,000
2.14.04 .2.01.0 5	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Tersedianya kader Pengelola dan Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	645 orang	1,425,000,000
2.14.04 .2.01.0 7	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	1 laporan	85,000,000
2.14.04 .2.01.0 8	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan dan keuangan keluarga)	1 laporan	141,155,380
2.14.04 .2.01.0 9.	Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	jumlah dokumen hasil Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	1 dokumen	119535000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat .

Sebagai sebuah dokumen perencanaan organisasi, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak yang ada dalam Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Kabupaten Lampung Barat Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dalam rangka perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

Liwa, 3 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



M. DANANG HARISUSENO, S.Ag.,M.H
PEMBINA Utama MudaIV.c
NIP. 19701121 200003 1 003

Tabel T.C.29

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Dinas PPKBPPA Tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat

Dinas PPKBPPA

Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah SAMPAI dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja tahun 2021		Tingkat Realisasi	Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		
													Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2	bidang	2	bidang	2	bidang	2	bidang	100%	2	bidang	2	bidang	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	dok	54	dok	18	dok	18	dok	100%	18	dok	90	dok	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun	25	dok	15	dok	5	dok	5	dok	100%	5	dok	25	dok	100.0

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	15	dok	9	dok	1	dok	1	dok	100 %	3	dok	13	dok	86.7
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	5	dok	100 %	1	dok	9	dok	180.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	25	dok	15	dok	5	dok	3	dok, bulan	100 %	5	dok	23	dok	92.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi SKPD yang tersusun dan pelaksanaan rapat Koordinasi	10	dok, Bulan	6	dok, bulan	2	dok, bulan	2		100 %	2	dok, bulan	10	dok, bulan	100.0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	60	bulan	36	bulan	12	bulan			100 %	12	bulan	48	bulan	80.0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang di tersedia	60	Bulan	36	bulan	12	Bulan	12	bulan	100 %	12	Bulan	60	Bulan	100.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteranyan g di susun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang di susun	5	dok	3	dok	1	do k	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Formal	12	orang	6	Orang	3	ora ng				3	oran g	9	orang	75.0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	orang	6	Orang		ora ng	0	Oran g			oran g	6	orang	50.0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	60	bulan	36	bulan	12	bul an	12	bula n	100 %	12	bula n	60	bula n	100.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	Jenis	30	jenis	9	Jen is	9	Jenis	100 %	15	Jeni s	54	Jenis	112.5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	125	jenis	75	jenis	25	jeni s	25	jenis	100 %	23	jeni s	123	jenis	98.4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	60	jenis	36	jenis	12	jeni s	12	jenis	100 %	10	jeni s	58	jenis	96.7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	20	SKHU	12	skhu	5	SK HU	5	SKH U	100 %	6	SKH U	23	SKH U	115.0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi Kunjungan Tamu	60	bulan	36	bulan	12	bul an	12	bula n	100 %	12	bula n	60	bula n	100.0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bulan	36	bulan	12	bul an	12	bula n	100 %	12	bula n	60	bula n	100.0

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang daerah yang diadakan	456	unit	134	unit		unit	6	unit		9	unit	149	unit	32.7
Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja, Jumlah Kursi Kerja, meja rapat, kursi rapat	37	unit	0.000	unit	15	unit	3	unit	100%	7	unit	10	unit	27.0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer, Jumlah Komputer Note Book, Jumlah Printer, Generator set	15	unit	1	unit	9	unit	9	unit	100%	7	unit	17	unit	113.3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Meter Gordin 15 paket, Jumlah Almari 7, Jumlah Filing Kabinet 12	19	unit	1	unit	15	paket	15	paket	100%	19	paket	35	paket	184.2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	100	%		%	####				%	#VALUE!	%	#VALUE!
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar 2000	10,000	surat	6000	surat	2000	surat				2000	surat	8000	surat	80.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon, Air dan Listrik 322 rekening dan spedy	7	rek	7	rek	7	rek	7	rek	100%	7	rek	7	rek	100.0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	125	jenis	75	jenis	47	jenis	47	jenis	100%	47	jenis	169	jenis	135.2
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Aparatur, tenaga honor, penjaga kantor dan biaya ADM keuangan	81	orang	45	orang	20	orang	20	orang	100%	15	orang	80	orang	98.8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%								31	unit	31	unit	31.0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil 6 unit dan jumlah motor 41 unit yang terpelihara	235	unit	124	unit	30	unit	29	unit	97%	30	unit	183	unit	77.9
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	4	Gedung	2	Gedung	1	gedung	1	gedung	100%	1	gedung	4	gedung	100.0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Genset yang dipelihara 1 unit, Komputer 6 unit, Printer 4 unit dan peralatan perlengkapan mupen 6	78	unit	45	unit	0	unit	0	unit	100%	15	unit	60	unit	76.9
													0		#DIV/0!
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang melakukan perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender	100	%	100	%								100		100.0
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		100	Orang			50	orang	50	Orang	100%	50	orang	100	orang	100.0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta yang ikut Advokasi dan fasilitasi PUG ikut dalam pembentukan Puspaga dan jumlah puspaga dibentuk	300	Orang	100	orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	200	Orang	66.7
Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota													0		#DIV/0!

Pengembangan komunikasi. Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah peserta pembinaan P3KSS	60	orang								60	orang	60	orang	100.0
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100	%										0		0.0
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		936	Orang										0		0.0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan dan pencegahan KDRT	936	orang	296	Orang	60	orang	60	orang	100%	50	orang	406	orang	43.4
Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan di Lampung Barat												0		#DIV/0!
Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah desa ramah perempuan dibentuk	2	desa			0	0	0	#DIV/0!	2	desa		2	desa	100.0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	32,5	%										0		#VALUE!
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak		617	Orang										0		0.0

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang dilatih menjadi Satgas/Kader Gerakan Sayang Ibu	1585	Orang	936	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	0	Orang	936	Orang	59.1
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang ikut dalam pembentukan Puspaga dan jumlah puspaga dibentuk	750	Orang	300	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	50	Orang	350	Orang	46.7
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan yang akan menjadi warga binaan peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera 150 orang	750	Orang	300	Orang	150	orang	150	orang	100%	0	orang	450	orang	60.0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													0		#DIV/0!
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang dilatih menjadi Satgas/Kader Gerakan Sayang Ibu	4,102,15	Pekon, Orang, Kec	300	ORANG	0	orang	-	Orang		30	orang	330	orang	#VALUE!

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan satgas P2TPA	225	Orang	-	-	21	Orang	21	orang		0	Orang	#VALUE!	Orang	#VALUE!
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-150	Orang										0		0.0
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		450,15	Orang, Satgas	360	Orang, stgas	20	orang, satgas	-	orang		20	orang, satgas	380	orang, satgas	#VALUE!
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Gender Anak yang terupdate	50	buku										0		0.0
Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-50	Buku										0		0.0
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Profil data gender yang tersusun	250	buku	150	Buku	50	Buku	50	buku	100%	50	buku	250	buku	100.0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian nilai evaluasi kabupaten Layak Anak	800	Point										0		0.0

Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		60,15	Orang, Kec										0		#VALUE!
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kabupaten Layak Anak dan jumlah peserta sosialisasi anak Berhadapan dengan Hukum	2,286	Kelompok, Orang	2,286	orang	75,136	Orang	####	orang		45	Orang	#VALUE!	Orang	#VALUE!
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan forum anak dan terpilihnya duta anak lampung barat	180,15	Orang, Kec	60,15	Orang,kec	60	Orang	60	orang	100%	60	Orang	#VALUE!	Orang	#VALUE!
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-1,30	Lokasi, Sekolah										0		#VALUE!
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Junlah taman bermain ramah anak dalam upaya persiapan KLA	5	lokasi	3	Lokasi	1	Lokasi	1	lokasi	100%	0	LOKASI	4	LOKASI	80.0
Pengembangan KIE pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tk daerah	Junlah taman bermain ramah anak										1	lokasi	1	lokasi	#DIV/0!
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pendampingan anak yang membutuhkan perlindungan khusus	90%	%										0		0.0

Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											100	orang	100	orang	#DIV/0!
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten	Jumlah peserta rapat koordinasi dan sosialisasi perlindungan khusus anak serta TPPO'										100	orang	100	orang	#DIV/0!
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150	Orang										0		0.0
Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	650	Orang	350	Orang	150	Orang	0		0%			350		53.8
Penyediaan layanan Pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota	Jumlah kasus yang tertangani										15	kecamatan	15	kecamatan	#DIV/0!
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak													0		#DIV/0!
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak										45	orang	45	orang	#DIV/0!

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi jangka panjang	30	%					35	%	#DIV/0!			35		116.7
Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dg pemda kab/kot dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk													0		#DIV/0!
Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)	jumlah akseptor yang dilayani selama kegiatan										3340	Orang	3340	Orang	#DIV/0!
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		25,28	Buku, Rumah Data										0		#VALUE!
Penyusunan Profil Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Buku Profil perkembangan Penduduk	145	buku	95	buku	25	bu ku	25	BUK U	100%			120		82.8
Penyediaan data dan informasi keluarga	tersedianya formn data pencegahan stunting										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	tersedianya jaringan internet dan pengolahan data										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Rumah Dataku yang terbentuk	*100	Pekon	0	pekon	15	pekon	15	pekon	100%	0	pekon	15	pekon	#VALUE!

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	78	%										0		0.0
Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		150,15	Kali, Kec, Orang										0		#VALUE!
Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	terlaksananya koordinasi pencegahan stunting										3	kl	3	kl	#DIV/0!
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya lokal	tersedianya media KIE cetak										1	kl	1	kl	#DIV/0!
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah pelaksanaan KIE Program KKBPK melalui mobil unit pelayanan	150	Kali	54	kali	10	kl	10	kl	100%			64		42.7
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)	tersedianya operasional lokakarya mini TK Desa pencegahan stunting										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK	tersedianya pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluh KKBPK										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Pengendalian Program KKBPK	tersedianya operasional audit stunting										15	kec	15	kec	#DIV/0!

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	15 kecamatan, 150 kali	15, 290	Kec, Orang										0		#VALUE!
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Kecamatan yang menerima sarana Operasional Balai PLKB	75	Kec	45	kec	15	kec	15	kec		0			60	80.0
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah peserta bimbingan teknis bagi Petugas Pos Pembantu KB Desa dan Petugas Sub Pos Pembina KB Desa dan kader IMP	1450	Orang	100	orang	50	orang	0			15	kec		115	#VALUE!
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		5720, 15, 3, 80	Pus, Kec, Kelom pok, Orang											0	#VALUE!
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	terdistribusinya alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan									#DIV/0!	15	kec		15	#DIV/0!
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan KB									#DIV/0!	111	akseptor		111	#DIV/0!
penyusunan rencana kebutuhan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan KB									#DIV/0!	554	akseptor		554	#DIV/0!

Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	tersedianya operasional koordinasi pelayanan difaskes									#DIV/0!	15	kecamatan	15	kecamatan	#DIV/0!
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapat Pelayanan KB	272465	Orang	159425	orang	55840	orang	####	orang	100%	55840	orang	271105	orang	99.5
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pembangunan dan penyediaan peralatan/ perlengkapan Balai Penyuluh KB Kecamatan	62	Kec	32	kec	15	kec	15	kec	100%	0		47		75.8
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Kelompok Pelaksana Terbaik PIK KR Tingkat Kabupaten	15	Kelompok	6	Kelompok	3	Kelompok	3	Kelompok	100%	0		9		60.0
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Pengelola Fasilitas Kesehatan/ Klinik KB yang ikut pelatihan pen catatan dan pelaporan hasil Pelayanan KB	375	orang	150	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	0		150		40.0
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													0		#DIV/0!

Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pekon Terbaik Pelaksana Kegiatan Kesrak PKK KB Kesehatan dan terlaksananya penilaian Lomba serta tersalurkannya dana hibah	15	Pekon	9	Pekon	3	pekon	3	pekon juara	100%			12		80.0
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung Keluarga Berkualitas yang terbina									#DIV/0!	44	pekon	44	pekon	#DIV/0!
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah PUS yang di layani KB selama kegiatan Baksos	1800	Orang, Kec	1080	orang	3340	orang	0	Orang	0%	0		10800		60.0
		15	kec							#DIV/0!	0		0		0.0
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah peserta pelatihan dan pekon yang terbina	544	orang	408	orang	136	orang	136	orang	100%	6	Pekon	550	Pekon	101.1
		236	pekon	177	pekon	59	pekon			0%			177		75.0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		30	%							#DIV/0!			0		0.0
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										#DIV/0!			0		#DIV/0!

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB). Bina Keluarga Remaja (BKR). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL). Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok BKB Terbaik dan jumlah Kader BKB,BKR,BKL yang dilatih, jumlah pengelola dan kader yang mengikuti harganas	15	Kelompok	9	kelompok	3	kelompok	3	kelompok	100%	3	kelompok	15	kelompok	100.0
Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	tersedianya sarana dan prasarana BKB KIT Stunting dan siap nikah bagi kelompok BKB	0	kec	0		0		-		#DIV/0!	15	kec	15	kec	#DIV/0!
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola UPPKS yang dilatih'	680	orang	136	Orang	136	orang	136	orang	100%	72	orang	344	orang	50.6
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumla kelompok PIK R yang mengikuti sosialisasi	300	orang	180	orang	60	orang	60	orang	100%	8	kelompok	248	kelompok	82.7
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana.	Jumlah peserta ikut penyuluhan penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS	300	orang	170	orang	50	orang	50	orang	100%	0		220		73.3

Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)															
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	tersedianya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga								#DIV/0!	15	kecamatan		15	kecamatan	#DIV/0!

LAMPIRAN I RENJA

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100	13,823,745,880			100	14,405,191,268
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	Liwa	80.00%	3,991,451,000	APBD		80.00%	3,666,201,000
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		19 dokumen	34,000,000	APBD		19 dokumen	38,000,000
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	4,500,000	APBD		7 dokumen	5,000,000
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	6,500,000	APBD		1 dokumen	7,000,000
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4 dokumen	3,500,000	APBD		4 dokumen	4,000,000
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	4,000,000	APBD		1 dokumen	4,500,000
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	4,000,000	APBD		1 dokumen	4,500,000

01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		1 dokumen	3,500,000	APBD		1 dokumen	4,000,000
01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja		4 dokumen	8,000,000	APBD		4 dokumen	9,000,000
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan PD yang dilaksanakan		100%	2,644,301,000	APBD		100%	2,645,201,000
01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		28 orang	2,631,801,000	APBD		28 orang	2,631,801,000
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		2 laporan	3,500,000	APBD		2 laporan	3,500,000
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18 laporan	5,000,000	APBD		18 laporan	5,500,000
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 lap	4,000,000	APBD		1 lap	4,400,000
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan		100%	15,000,000	APBD		100%	15,000,000
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3 orang	15,000,000	APBD		3 orang	15,000,000

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan		100%	199,500,000	APBD		100%	229,000,000
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14 jenis	6,000,000	APBD		14 jenis	6,500,000
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		24 jenis	8,000,000	APBD		24 jenis	9,000,000
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		10 jenis	20,000,000	APBD		10 jenis	22,000,000
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		6 SKHU	8,000,000	APBD		6 SKHU	8,500,000
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu/makan minum tamu yang dipenuhi		12 bulan	7,500,000	APBD		12 bulan	8,000,000
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan		12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	175,000,000
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		100%	515,000,000	APBD		100%	115,000,000
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		14 unit	45,000,000	APBD		30 unit	50,000,000
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya		4 Unit	50,000,000	APBD		4 unit	50,000,000

01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan		1 unit	400,000,000	APBD		0 UNIT	
01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	20,000,000	APBD		1 unit	15,000,000
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	178,000,000	APBD		100%	183,000,000
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Surat Menyurat		12 laporan	5,000,000	APBD		12 laporan	6,000,000
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 laporan	33,000,000	APBD		12 laporan	35,000,000
01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 laporan	25,000,000	APBD		1 laporan	27,000,000
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	115,000,000	APBD		12 laporan	115,000,000
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	405,650,000	APBD		100%	441,000,000
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya		30	350,000,000	APBD		30	385,000,000
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 unit	10,650,000	APBD		15 unit	11,000,000

01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/rehabilitasi		1	45,000,000	APBD		1	45,000,000
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,761,604,500	APBD		38,00	3,025,230,850
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya anggaran responsif gender pada APBD		10%	333,031,000	APBD		10%	345,000,000
2.08.02.2.01	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER(PUG) pada LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlahperangkat daerah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi kebijakan PUG dan PPRG		55(OPD dan Kec)	333,031,000	APBD		55(OPD dan Kec)	345,000,000
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		55 OPD	258,031,000	APBD		55 OPD	265,000,000
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		55 OPD	75,000,000	APBD		55 OPD	80,000,000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif		50%	603,906,500	APBD		60%	675,297,150
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diedukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan		120 orang	170,000,000	APBD		120 orang	187,000,000

2.08.03. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten	1 dokumen	80,000,000	APBD	1 dokumen	88,000,000
2.08.03. 2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten	55 OPD	90,000,000	APBD	55 OPD	99,000,000
2.08.03. 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab kota	6 layanan	167,100,500	APBD	6 layanan	183,810,550
2.08.03. 2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 orang	95,000,000	APBD	10 orang	104,500,000
2.08.03. 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah layanan tindak lanjut bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	6 layanan	72,100,500	APBD	6 layanan	79,310,550
2.08.03. 2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga Penyedia Layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab yang	60 orang	266,806,000	APBD	60 orang	304,486,600
2.08.03. 2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	76,806,000	APBD	1 laporan	84,486,600

		Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas							
2.08.03. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	70 orang	100,000,000	APBD		70 orang	121,000,000	
2.08.03. 2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	90,000,000	APBD		1 dokumen	99,000,000	
2.08.04.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	% kader perempuan yang dibina	20%	265,000,000	APBD		20%	291,500,000	
2.08.04. 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader P3KSS dan GSI yang dibina	150 orang	175,000,000	APBD		150 orang	192,500,000	
2.08.04. 2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten	55 Perangkat Daerah	85,000,000	APBD		55 Perangkat Daerah	93,500,000	
2.08.04. 2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	90,000,000	APBD		2 laporan	99,000,000	
2.08.04. 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Pekon terbaik pelaksana P3KSS dan GSI	1 pekon	90,000,000	APBD		1 pekon	99,000,000	

	yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.04. 2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 lembaga	90,000,000	APBD		15 lembaga	99,000,000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% OPD yang memanfaatkan data pilah gender	30%	125,000,000	APBD		40%	135,000,000	
2.08.05. 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Data terpilah Gender yang tersusun	50 buku	125,000,000	APBD		55 buku	135,000,000	
2.08.05. 2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia	50 buku	65,000,000	APBD		55 buku	70,000,000	
2.08.05. 2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55 buku	60,000,000	APBD		55 buku	65,000,000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHN HAK ANAK	Terpenuhinya Hak-hak anak	580	715,000,000	APBD		590	786,500,000	

2.08.07	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif		60%	719,667,000				791,933,700
2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat daerah yang diadvokasi		55 PD	162,724,000	APBD		62%	178,996,400
2.08.07.2.01.01	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Progran dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupate/Kota		55 PD	112,724,000	APBD		55 PD	123,996,400
2.08.07.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinas dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kwengan Kabupaten/Kota		1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	55,000,000
2.08.07.2.02	Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabuapten/Kota	Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)	330,943,000	APBD		3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)	363,937,300
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan		20 orang	91,000,000	APBD		20 orang	100,000,000
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sigkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab kota		20 orang	189,943,000	APBD		3	208,937,300

2.08.06, 2.02.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	3	50,000,000	APBD	1 laporan	55,000,000
2.08.07. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan	12 orang	226,000,000	APBD	1 laporan	249,000,000
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah	jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah	1 laporan	100,000,000	APBD	1 laporan	110,000,000
2.08.07. 2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	1 laporan	76,000,000	APBD	1 dokumen	84,000,000
	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah tingkat daerah kabupaten	jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah tingkat daerah kabupaten	1 dokumen	50,000,000		1 dokumen	55,000,000
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7,070,690,380			7,713,759,418
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	% masyarakat yang terpapar bangga kencana	70%	645,000,000	APBD	70.00%	715,500,000
2.14.02. 2.01	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dg pemda kab/kot dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah dokumen GDPK disusun	1 dokumen	350,000,000	APBD	1 dokumen	395,000,000

2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Peserta KB Aktif (PA) MKJP		25%	4,187,000,000	APBD		28%	4,535,700,000
		% PUS yang tidak terlayani/ Unmeet need		16%		APBD		14%	
2.14.03 2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi dan Informasi edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kecamatan		4 kali	190,000,000	APBD		4 kali	209,000,000
2.14.03 2.01.01	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga ,kependudukan , dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja		8 org	60,000,000	APBD		8 org	66,000,000
2.14.03 2.01.02	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen KIE Program Bangga Kencana		4 dok	50,000,000	APBD		4 dok	55,000,000
2.14.03 2.01.04	Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang		4 dok	80,000,000	APBD		4 dok	88,000,000
2.14.03 2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)		4 laporan	240,000,000	DAK NON FISIK		DAK NON FISIK	264,000,000
2.14.03 2.01.07	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Jumlah Laporan hasil pengelolaan operasioanl dan srana di balai penyuluhan bangga kencana (pembangunan keluarga , kependudukan dan KB		15 laporan	600,000,000	DAK NON FISIK		DAK NON FISIK	660,000,000
2.14.03 2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK		1 laporan	45,000,000	APBD		APBD	49,500,000
						APBD			

2.14.03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas KB	Persentaser peserta KB Baru		80%	210,000,000	APBD		80%	231,000,000
2.14.03 2.02.01	Pembinaan IMP dan program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB		15 organisasi	50,000,000	APBD		APBD	55,000,000
2.14.03 2.02.02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB PLKB yang tersedia		15 Unit	100,000,000	APBD		APBD	110,000,000
2.14.03 2.02.04	Penggerakan kader IMP	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader IMP		136 orang	60,000,000	APBD		APBD	66,000,000
2.14.03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pelayanan KB di Faskes dan jejaringnya		12 bulan	2,387,000,000	APBD		APBD	2,625,700,000
2.14.03 2.03.01	pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya		1 laporan	12,000,000	APBD		APBD	13,200,000
2.14.03 2.03.02	peningkatam kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kb	Jumlah akseptor Peningkatan Komptensi Pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB		45 orang	75,000,000	APBD		APBD	82,500,000
2.14.03 2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)		1000 orang	250,000,000	DAK NON FISIK		1000 orang	275,000,000
2.14.03 2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang pelayanan KB		1 dokumen	200,000,000	APBD		1 dokumen	220,000,000
2.14.03 2.03.06	penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit sarana penunjang pelayanan KB		15 unit	1,600,000,000	DAK NON FISIK		15 unit	1,760,000,000

2.14.03 2.03.08	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	110,000,000
2.14.03 2.03.09	Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan		15 orang	90,000,000	APBD		15 orang	99,000,000
2.14.03 2.03.10	Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi		50 orang	60,000,000	APBD		50 orang	66,000,000
2.14.03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB	Jumlah kampung KB berkembang dan Mandiri		5 pekon berkembang, 1 mandiri	1,400,000,000	APBD		5 pekon berkembang, 1 mandiri	1,470,000,000
2.14.03 2.04.01	Penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan Penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		7 organisasi	250,000,000	APBD		7 organisasi	210,000,000
2.14.03 2.04.02	Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi Pembangunan lintas sektor di kampung KB		15 dokumen	150,000,000	APBD		15 dokumen	160,000,000
2.14.03 2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		59 pekon	800,000,000	DAK NON FISIK		59 pekon	880,000,000
2.14.03 2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB		1 laporan	200,000,000	APBD		1 laporan	220,000,000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	indeks pembangunan keluarga		52,52	2,238,690,380	APBD		54	2,462,559,418

2.14.04. 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang dibina		52%	2,238,690,380	APBD		52%	2,462,559,418
2.14.04. 2.01.01	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		6 kelompok	200,000,000	APBD		6 kelompok	220,000,000
2.14.04. 2.01.02	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah Unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)		15 unit	78,000,000	APBD		15 unit	85,800,000
2.14.04. 2.01.03	Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah laporan hasil Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	110,000,000
2.14.04. 2.01.04	Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah kader Pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS)		72 orang	90,000,000	APBD		72 orang	99,000,000
2.14.04. 2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Tersedianya kader Pengelola dan Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		645 orang	1,425,000,000	DAK FISIK		645 orang	1,567,500,000
2.14.04. 2.01.07	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan		1 laporan	85,000,000	APBD		1 laporan	93,500,000

		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)							
2.14.04. 2.01.08	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga menjadi orang tua hebat , generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat , generasi berencana, kelanjutusiaan dan keuangan keluarga)		1 laporan	141,155,380	APBD		1 laporan	155,270,918
2.14.04. 2.01.09.	Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	jumlah dokumen hasil Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK		1 dokumen	119535000	APBD		1 dokumen	131488500

SISTEMATIKA RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyakkegiatan dan jumlah subkegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyaksubkegiatan. Alokasi dana tahun 2022 untuk Belanja Daerah sebesar Rp..... terealisasi sebesar Rp..... ataupersen. Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu : 1. Subkegiatan realisasi fisik/output sebesarpersen. Realisasi

fisik/output tidak mencapai 100 persen karena 2. Subkegiatan realisasi fisik/output sebesarpersen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena

3. Dst Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2022 adalah sebesarpersen. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP LAMPIRAN I LAMPIRAN II Catatan : Secara Rinci Sistematika Penyusunan dapat melihat pada Permendagri 86 Tahun

RENCANA KERJA 2023 DINAS P2KBP3A